

**MODEL KOMUNIKASI DAN PERSEPSI PUBLIK DALAM PENATAAN DESA DI
BIDANG PENATAAN DESA DAN PEMERINTAHAN DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANYUMAS**

Gian Widayoko¹, Sugeng Dwi Harianto², Enung Asmaya³

^{1,2,3}UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

¹gwidayoko@gmail.com, ²244120400031@mhs.uinsaizu.ac.id,

³enungasmaya@uinsaizu.ac.id

ABSTRACT

Public perception of village restructuring policies constitutes a crucial factor in determining the success of policy implementation. Perception is shaped not only by the substance of the message delivered, but also by the mode of delivery, the credibility of the communicator, and the prior experiences of the community. This study employs a qualitative research approach. The findings indicate that the success of village restructuring policies is largely determined by the effectiveness of organizational communication models, the appropriateness of governmental communication strategies, and the ways in which public perception is constructed within society. A structured and well-coordinated communication model within the Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas serves as a fundamental foundation in maintaining message consistency and policy synchronization prior to dissemination to the public. Communication strategies emphasizing transparency, participation, dialogue, and the involvement of community leaders have proven effective in enhancing public trust and support for the implemented policies. Furthermore, public perception is influenced by prior experiences, levels of informational understanding, socio-economic conditions, and the dynamics of local cultural contexts within villages. Therefore, adaptive, inclusive, and sustainable communication is essential in building social legitimacy and ensuring that village restructuring policies are accepted and effectively implemented, ultimately contributing to accountable and sustainable village governance in Banyumas Regency.

Keywords: *Communication; Public Perception; Village Restructuring Policy; Government*

ABSTRAK

Persepsi publik terhadap kebijakan penataan desa menjadi faktor krusial yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Persepsi tidak hanya dibentuk oleh isi pesan yang disampaikan, tetapi juga oleh cara penyampaian, kredibilitas komunikator, serta pengalaman sebelumnya yang dimiliki masyarakat. Metode dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Hasil dalam penelitian ini yaitu keberhasilan kebijakan penataan desa sangat ditentukan oleh efektivitas model komunikasi organisasi, ketepatan strategi komunikasi pemerintah, serta bagaimana persepsi publik terbentuk di tengah masyarakat. Model komunikasi yang terstruktur dan terkoordinasi dengan baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas menjadi fondasi penting dalam menjaga konsistensi

pesan dan sinkronisasi kebijakan sebelum disampaikan kepada publik. Strategi komunikasi yang menekankan transparansi, partisipasi, dialog, serta pelibatan tokoh masyarakat terbukti mampu meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan. Di sisi lain, persepsi publik dipengaruhi oleh pengalaman, tingkat pemahaman informasi, kondisi sosial ekonomi, serta dinamika budaya lokal yang berkembang di desa. Oleh karena itu, komunikasi yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam membangun legitimasi sosial serta memastikan kebijakan penataan desa dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif demi terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan berkelanjutan di Kabupaten Banyumas.

Kata Kunci: Komunikasi; Persepsi Publik; Kebijakan Penataan Desa; Pemerintah

A. Pendahuluan

Penataan desa merupakan bagian penting dalam proses pembangunan daerah yang berkelanjutan, terutama dalam kerangka otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah kabupaten untuk mengelola wilayahnya (Devi Deswimar, 2014). Di Kabupaten Banyumas, penataan desa menjadi salah satu fokus strategis yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas melalui Bidang Penataan Desa dan Pemerintahan. Upaya ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, budaya, dan politik yang hidup di tengah masyarakat desa. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif menjadi kunci utama dalam memastikan kebijakan penataan desa dapat dipahami,

diterima, dan didukung oleh publik. Tanpa komunikasi yang tepat, kebijakan yang dirancang dengan baik sekalipun berpotensi menimbulkan resistensi dan kesalahpahaman.

Dalam konteks pemerintahan desa, komunikasi bukan sekadar proses penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat, tetapi merupakan proses interaksi dua arah yang membentuk pemahaman bersama (Syauket et al., 2024). Model komunikasi yang digunakan oleh instansi pemerintah sangat memengaruhi bagaimana pesan tentang penataan desa diterima dan ditafsirkan oleh masyarakat (Mulyadi, 2017). Jika komunikasi bersifat linier dan satu arah, maka potensi terjadinya distorsi pesan menjadi lebih besar. Sebaliknya, model komunikasi yang interaktif dan partisipatif membuka ruang dialog yang memungkinkan klarifikasi, negosiasi

makna, dan pembentukan persepsi yang lebih positif.

Persepsi publik terhadap kebijakan penataan desa menjadi faktor krusial yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut (Darmawan, 2019). Persepsi tidak hanya dibentuk oleh isi pesan yang disampaikan, tetapi juga oleh cara penyampaian, kredibilitas komunikator, serta pengalaman sebelumnya yang dimiliki masyarakat. Dalam banyak kasus, kebijakan pemerintah seringkali dipersepsikan berbeda oleh masyarakat karena adanya kesenjangan informasi atau kurangnya transparansi. Oleh sebab itu, pemilihan model komunikasi yang tepat menjadi kebutuhan mendesak dalam proses penataan desa.

Penataan desa di Kabupaten Banyumas mencakup berbagai aspek, seperti penyesuaian batas wilayah, penggabungan atau pemekaran desa, serta penataan administrasi pemerintahan desa. Setiap kebijakan tersebut memiliki implikasi langsung terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Perubahan batas wilayah, misalnya, dapat memengaruhi akses pelayanan publik, identitas sosial, dan distribusi sumber daya. Kondisi ini menuntut

adanya komunikasi yang sensitif terhadap dinamika sosial dan budaya masyarakat setempat agar tidak menimbulkan konflik horizontal.

Selain itu, dinamika politik lokal juga turut memengaruhi proses penataan desa. Kepentingan elite lokal, tokoh masyarakat, dan perangkat desa dapat memengaruhi opini publik terhadap kebijakan yang diambil. Dalam situasi seperti ini, komunikasi pemerintah harus mampu menjembatani berbagai kepentingan yang ada. Pendekatan komunikasi yang inklusif dan dialogis menjadi strategi penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat penting dalam proses pembangunan desa. Tanpa adanya kepercayaan, setiap kebijakan akan selalu dipandang dengan kecurigaan (Radiansyah & Sabilla, 2022). Oleh karena itu, model komunikasi yang transparan, akuntabel, dan responsif perlu diterapkan secara konsisten oleh pemerintah daerah. Komunikasi yang hanya bersifat formal dan administratif tidak cukup untuk membangun kedekatan emosional dengan masyarakat desa.

Dalam era digital saat ini, pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat juga mengalami perubahan signifikan. Media sosial dan platform digital menjadi saluran alternatif dalam menyebarkan informasi kebijakan. Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan komunikasi konvensional dengan komunikasi digital agar pesan tentang penataan desa dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Keterbukaan informasi melalui berbagai kanal komunikasi akan membantu membentuk persepsi publik yang lebih objektif.

Namun demikian, tidak semua masyarakat desa memiliki tingkat literasi media yang sama. Perbedaan tingkat pendidikan, akses teknologi, dan budaya komunikasi menjadi tantangan tersendiri dalam menyampaikan pesan kebijakan. Oleh karena itu, strategi komunikasi harus disesuaikan dengan karakteristik sosial masyarakat setempat. Pendekatan tatap muka melalui musyawarah desa tetap menjadi sarana efektif dalam membangun pemahaman bersama.

Musyawarah desa sebagai forum partisipatif memiliki peran penting dalam membentuk persepsi

publik terhadap kebijakan penataan desa. Dalam forum tersebut, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, keberatan, maupun dukungan terhadap rencana yang diajukan. Jika proses ini berjalan secara terbuka dan demokratis, maka hasil keputusan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Sebaliknya, jika masyarakat merasa tidak dilibatkan, maka potensi penolakan akan semakin besar.

Model komunikasi transaksional yang menekankan interaksi timbal balik dapat menjadi pendekatan yang relevan dalam konteks ini. Melalui model ini, pemerintah tidak hanya berperan sebagai pengirim pesan, tetapi juga sebagai pendengar yang aktif. Proses komunikasi menjadi ruang negosiasi makna antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, persepsi publik tidak dibentuk secara sepihak, melainkan melalui proses dialog yang konstruktif.

Pentingnya penelitian mengenai model komunikasi dan persepsi publik dalam penataan desa semakin relevan ketika melihat kompleksitas persoalan yang dihadapi pemerintah daerah. Setiap kebijakan penataan desa berpotensi memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pesan kebijakan dikonstruksi, disampaikan, dan diinterpretasikan oleh publik. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas model komunikasi yang diterapkan.

Selain aspek komunikasi, faktor budaya lokal juga memengaruhi cara masyarakat memaknai kebijakan pemerintah. Nilai-nilai gotong royong, musyawarah, dan kearifan lokal menjadi bagian penting dalam struktur sosial desa. Jika komunikasi pemerintah tidak mempertimbangkan nilai-nilai tersebut, maka pesan yang disampaikan berpotensi tidak selaras dengan kerangka berpikir masyarakat. Oleh sebab itu, pendekatan komunikasi yang berbasis budaya lokal menjadi sangat penting.

Dalam praktiknya, seringkali terjadi kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar pihak atau lemahnya penyampaian informasi. Ketika informasi tidak tersampaikan dengan jelas, masyarakat cenderung membentuk

persepsi berdasarkan asumsi atau rumor yang beredar. Situasi ini dapat memicu konflik sosial yang sebenarnya dapat dihindari melalui komunikasi yang efektif.

Transparansi informasi menjadi salah satu indikator utama dalam membangun persepsi publik yang positif. Pemerintah perlu menjelaskan secara rinci tujuan, manfaat, serta dampak dari kebijakan penataan desa. Penjelasan tersebut harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengetahui kebijakan tersebut, tetapi juga memahami rasionalitas di baliknya.

Selain transparansi, konsistensi pesan juga memegang peranan penting dalam membentuk persepsi publik. Perbedaan informasi antara satu pejabat dengan pejabat lainnya dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi internal yang baik dalam tubuh organisasi pemerintah agar pesan yang disampaikan kepada publik bersifat seragam dan jelas. Konsistensi ini akan memperkuat kredibilitas pemerintah di mata masyarakat.

Penataan desa juga berkaitan erat dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Ketika penataan dilakukan dengan tujuan memperbaiki tata kelola pemerintahan desa, maka komunikasi mengenai manfaat tersebut harus ditekankan kepada masyarakat. Masyarakat perlu diyakinkan bahwa kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan sekadar kepentingan administratif. Penyampaian pesan yang berorientasi pada kepentingan publik akan lebih mudah diterima.

Di sisi lain, persepsi publik seringkali dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu terhadap kebijakan pemerintah. Jika sebelumnya terdapat kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat, maka tingkat kepercayaan terhadap kebijakan baru cenderung lebih rendah. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pendekatan persuasif yang berkelanjutan untuk membangun kembali kepercayaan publik. Komunikasi yang empatik dan terbuka dapat menjadi langkah strategis dalam proses tersebut.

Keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perangkat desa

dalam proses komunikasi juga menjadi faktor penting dalam membentuk opini publik. Tokoh-tokoh tersebut memiliki pengaruh sosial yang kuat dan dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Melalui kolaborasi yang baik, pesan kebijakan dapat disampaikan dengan lebih efektif dan dipercaya oleh masyarakat. Sinergi ini akan memperkuat legitimasi kebijakan penataan desa.

Urgensi kajian tentang model komunikasi dan persepsi publik dalam penataan desa terletak pada kebutuhan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan responsif. Tanpa adanya komunikasi yang efektif, kebijakan yang dirancang dengan tujuan baik sekalipun dapat mengalami kegagalan implementasi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi model komunikasi yang paling sesuai dengan karakteristik masyarakat desa di Kabupaten Banyumas.

Dengan memahami hubungan antara model komunikasi dan persepsi publik, pemerintah daerah dapat merumuskan strategi komunikasi yang lebih adaptif dan kontekstual. Hasil kajian ini

diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam bidang komunikasi pemerintahan, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pelaksanaan penataan desa. Pada akhirnya, komunikasi yang efektif akan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan desa yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan di Kabupaten Banyumas.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam model komunikasi dan persepsi publik dalam penataan desa di Bidang Penataan Desa dan Pemerintahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara komprehensif berdasarkan pengalaman, pandangan, serta interpretasi para pejabat yang terlibat langsung dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Penelitian kualitatif deskriptif berfokus pada penggalian makna, proses, dan dinamika komunikasi organisasi yang berlangsung di lingkungan

pemerintahan daerah. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami secara kontekstual bagaimana kebijakan penataan desa dikomunikasikan dan bagaimana persepsi publik terbentuk melalui interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

Narasumber dalam penelitian ini terdiri atas pejabat struktural yang memiliki kewenangan strategis dalam bidang penataan desa, yaitu Drs. Hirawan Danan Putra, M.Si selaku Kepala Dinas; Istherina Flamboyan, SH selaku Sekretaris Dinas; Yessy Erixa Chandrawati, SE selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Dwi Satya Wardini, SE selaku Kepala Subbagian Keuangan; Daryanti, S.Sos selaku Kepala Bidang Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa; Henny Sutikno, S.IT., M.Kes selaku Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat; serta Menik Nur Utami, SH selaku Kepala Bidang Kerja Sama Desa dan Ekonomi Desa. Pemilihan narasumber dilakukan melalui teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki kompetensi, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam proses komunikasi kebijakan penataan desa.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam yang memungkinkan peneliti mengeksplorasi strategi komunikasi, pola koordinasi internal, serta respons terhadap dinamika persepsi publik.

Teknik analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil wawancara ditranskripsikan dan dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait model komunikasi yang digunakan, mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat, serta faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan persepsi publik. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan keterangan antar narasumber serta triangulasi metode melalui analisis dokumen resmi dan observasi kegiatan kelembagaan. Melalui prosedur tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan deskripsi yang akurat dan mendalam mengenai praktik komunikasi pemerintahan dalam penataan desa di Kabupaten Banyumas.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Model Komunikasi Organisasi dalam Penataan Desa

Model komunikasi organisasi dalam penataan desa di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas merupakan fondasi utama dalam memastikan kebijakan dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi. Penataan desa bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga menyangkut aspek sosial, politik, dan kultural yang membutuhkan pendekatan komunikasi yang sistematis. Dalam konteks organisasi pemerintahan, komunikasi menjadi instrumen strategis untuk menyelaraskan visi, misi, serta langkah operasional antarbidang (Firmansyah et al., 2025; Ida, 2013). Tanpa sistem komunikasi yang terstruktur, kebijakan penataan desa berpotensi mengalami distorsi informasi maupun kesalahpahaman dalam implementasinya. Oleh karena itu, model komunikasi organisasi memegang peranan sentral dalam mendukung tata kelola

pemerintahan desa yang akuntabel dan partisipatif.

Secara struktural, komunikasi organisasi di dinas ini berlangsung melalui jalur vertikal dan horizontal. Komunikasi vertikal terjadi antara pimpinan dan staf di setiap bidang, sedangkan komunikasi horizontal berlangsung antarbidang untuk memastikan sinkronisasi program. Dalam proses penataan desa, koordinasi lintas bidang menjadi sangat penting karena kebijakan yang diambil seringkali bersinggungan dengan aspek keuangan, kelembagaan, serta tata kelola pemerintahan desa. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga koordinatif dan kolaboratif. Model komunikasi yang digunakan cenderung menggabungkan pendekatan linier dalam penyampaian kebijakan dan pendekatan interaktif dalam forum diskusi internal.

Dalam praktiknya, komunikasi formal dilakukan melalui rapat koordinasi, surat edaran, notulen resmi, serta dokumen kebijakan yang menjadi pedoman

pelaksanaan. Rapat koordinasi rutin menjadi ruang utama dalam membahas perencanaan, evaluasi, serta kendala yang dihadapi dalam penataan desa. Forum tersebut memungkinkan pimpinan menyampaikan arahan strategis sekaligus menerima masukan dari kepala bidang dan subbagian. Mekanisme ini menunjukkan bahwa komunikasi organisasi tidak hanya berjalan satu arah, tetapi membuka ruang dialog (Leonardus Leonardus et al., 2024). Hal ini penting untuk memastikan setiap kebijakan dipahami secara menyeluruh oleh seluruh unsur organisasi.

Selain komunikasi formal, komunikasi informal juga berperan dalam memperlancar arus informasi. Interaksi sehari-hari antarpegawai memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang lebih fleksibel dan cepat. Dalam situasi tertentu, komunikasi informal justru lebih efektif dalam menyelesaikan persoalan teknis di lapangan. Meskipun demikian, komunikasi informal tetap perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan miskomunikasi atau perbedaan interpretasi terhadap

kebijakan resmi. Oleh sebab itu, keseimbangan antara komunikasi formal dan informal menjadi kunci efektivitas organisasi.

Model komunikasi yang diterapkan dalam penataan desa juga dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan di tingkat pimpinan dinas. Kepemimpinan yang terbuka terhadap masukan akan mendorong terciptanya komunikasi dua arah yang sehat. Sebaliknya, pola komunikasi yang terlalu birokratis dapat menghambat aliran informasi dari bawah ke atas. Dalam konteks ini, keterbukaan pimpinan menjadi faktor penting dalam menciptakan budaya komunikasi yang partisipatif. Budaya organisasi yang komunikatif akan memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Dalam beberapa kesempatan, Drs. Hirawan Danan Putra, M.Si selaku Kepala Dinas menekankan pentingnya konsistensi informasi dan koordinasi lintas bidang agar tidak terjadi perbedaan persepsi dalam pelaksanaan kebijakan penataan desa. Beliau menegaskan bahwa setiap

kebijakan harus disampaikan melalui mekanisme resmi agar pesan yang diterima oleh masyarakat bersifat seragam. Sementara itu, Istherina Flamboyan, SH selaku Sekretaris Dinas menjelaskan bahwa fungsi sekretariat sangat vital dalam mengelola arus administrasi dan memastikan setiap informasi terdokumentasi dengan baik. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi organisasi dipandang sebagai elemen strategis dalam menjaga stabilitas dan kredibilitas kelembagaan.

Koordinasi antarbidang menjadi bagian penting dalam model komunikasi organisasi ini. Penataan desa seringkali memerlukan dukungan data keuangan, kelembagaan, serta regulasi yang harus disinkronkan secara terpadu. Oleh karena itu, setiap kepala bidang memiliki peran sebagai simpul komunikasi yang menghubungkan kebijakan pimpinan dengan pelaksanaan teknis di lapangan. Pola komunikasi semacam ini mencerminkan model komunikasi jaringan (*network communication*)

dalam organisasi. Jaringan komunikasi tersebut memperkuat integrasi antarunit kerja.

Dalam tataran teknis, komunikasi organisasi juga melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat penyebaran informasi. Surat elektronik, grup komunikasi internal, dan sistem administrasi digital menjadi sarana pendukung yang memperlancar koordinasi. Pemanfaatan teknologi ini membantu mengurangi keterlambatan informasi dan meningkatkan efisiensi kerja. Namun demikian, komunikasi tatap muka tetap dianggap penting dalam pembahasan isu-isu strategis (Ningrum, 2013). Kombinasi antara komunikasi digital dan konvensional menjadi ciri khas model komunikasi yang diterapkan.

Efektivitas komunikasi organisasi juga diukur dari kemampuan menyampaikan kebijakan secara jelas kepada perangkat desa. Pesan yang terlalu teknis atau birokratis berpotensi sulit dipahami di tingkat desa. Oleh karena itu, diperlukan proses

penyederhanaan bahasa kebijakan agar mudah diterima. Proses ini biasanya dilakukan melalui forum sosialisasi dan bimbingan teknis. Dengan demikian, komunikasi organisasi tidak berhenti pada tataran internal, tetapi berlanjut pada eksternal kelembagaan.

Model komunikasi organisasi dalam penataan desa juga menekankan pentingnya umpan balik. Setiap kebijakan yang telah disosialisasikan perlu dievaluasi melalui laporan dan masukan dari lapangan. Umpan balik tersebut menjadi dasar perbaikan kebijakan selanjutnya. Tanpa mekanisme umpan balik, komunikasi organisasi akan bersifat satu arah dan kurang adaptif terhadap dinamika lapangan. Oleh sebab itu, sistem pelaporan dan monitoring menjadi bagian integral dari model komunikasi ini.

Keterpaduan antara fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam komunikasi organisasi menunjukkan adanya pendekatan sistemik. Setiap tahap kebijakan penataan desa dikomunikasikan secara bertahap

sesuai dengan prosedur yang berlaku. Prosedur tersebut dirancang untuk menghindari tumpang tindih informasi antarbidang. Dengan demikian, model komunikasi organisasi menjadi instrumen pengendalian internal yang efektif. Stabilitas organisasi sangat bergantung pada kelancaran arus komunikasi tersebut.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, komunikasi organisasi juga berkaitan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Informasi yang jelas dan terdokumentasi dengan baik akan memudahkan proses pengawasan internal maupun eksternal. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah (Fuad, 2015). Model komunikasi yang akuntabel akan memperkuat legitimasi kebijakan penataan desa. Transparansi menjadi indikator kualitas komunikasi organisasi.

Secara keseluruhan, model komunikasi organisasi dalam penataan desa di lingkungan dinas ini menunjukkan kombinasi

antara struktur birokratis yang formal dan pendekatan dialogis yang partisipatif. Struktur formal memastikan adanya kepastian prosedur, sedangkan pendekatan dialogis membuka ruang partisipasi dan koordinasi. Sinergi antara kedua pendekatan tersebut menciptakan sistem komunikasi yang relatif stabil dan adaptif. Stabilitas ini menjadi prasyarat penting dalam pelaksanaan kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat desa.

Dengan demikian, model komunikasi organisasi dalam penataan desa tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai mekanisme koordinasi, kontrol, dan integrasi kelembagaan. Komunikasi menjadi jembatan antara perencanaan kebijakan dan implementasi di lapangan. Keberhasilan penataan desa sangat bergantung pada efektivitas model komunikasi yang diterapkan. Oleh karena itu, penguatan sistem komunikasi organisasi menjadi agenda penting dalam meningkatkan

kualitas tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas.

2. Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Membangun Partisipasi dan Kepercayaan Publik

Strategi komunikasi pemerintah dalam membangun partisipasi dan kepercayaan publik pada dasarnya diarahkan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dan masyarakat desa. Dalam konteks penataan desa, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi kebijakan, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun pemahaman bersama. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan memiliki legitimasi sosial melalui proses komunikasi yang terbuka dan inklusif. Tanpa strategi komunikasi yang tepat, kebijakan penataan desa berpotensi menimbulkan resistensi atau kesalahpahaman di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan komunikasi yang persuasif dan partisipatif menjadi

kunci utama dalam membangun kepercayaan publik.

Salah satu strategi yang diterapkan adalah transparansi informasi sejak tahap perencanaan kebijakan. Pemerintah berupaya menyampaikan tujuan, manfaat, serta implikasi dari penataan desa secara jelas kepada perangkat desa dan masyarakat. Transparansi ini dilakukan melalui forum sosialisasi, musyawarah desa, serta rapat koordinasi lintas sektor. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat memiliki ruang untuk memahami rasionalitas kebijakan yang diambil. Strategi ini bertujuan untuk meminimalisasi rumor dan asumsi negatif yang dapat berkembang di tengah masyarakat.

Selain transparansi, pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi bagian penting dari strategi komunikasi. Partisipasi publik tidak hanya dimaknai sebagai kehadiran dalam forum sosialisasi, tetapi juga sebagai keterlibatan aktif dalam memberikan masukan dan

pertimbangan. Pemerintah mendorong adanya dialog dua arah sehingga aspirasi masyarakat dapat terakomodasi (Agustini & Purnaningsih, 2018). Pendekatan ini mencerminkan model komunikasi partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Dengan demikian, kebijakan penataan desa tidak dipersepsikan sebagai keputusan sepihak dari pemerintah.

Strategi komunikasi juga diarahkan untuk memperkuat peran tokoh masyarakat sebagai opinion leader. Tokoh agama, tokoh adat, dan perangkat desa memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Pemerintah memanfaatkan peran strategis tersebut untuk membantu menyampaikan pesan kebijakan secara lebih efektif. Melalui kolaborasi ini, pesan yang disampaikan pemerintah memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat. Pendekatan berbasis kearifan lokal ini terbukti lebih mudah diterima oleh masyarakat desa.

Dalam implementasinya, strategi komunikasi pemerintah juga mempertimbangkan aspek

bahasa dan budaya lokal. Penyampaian informasi dengan bahasa yang sederhana dan kontekstual menjadi faktor penting agar pesan dapat dipahami dengan baik. Kebijakan yang disampaikan dengan istilah teknis yang terlalu birokratis berpotensi menimbulkan kebingungan. Oleh sebab itu, penyederhanaan bahasa kebijakan menjadi bagian dari strategi komunikasi yang adaptif. Pendekatan ini memperlihatkan sensitivitas pemerintah terhadap karakteristik sosial masyarakat desa.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Yessy Erixa Chandrawati, SE selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menegaskan pentingnya administrasi komunikasi yang tertib dan terdokumentasi sebagai bentuk akuntabilitas publik. Dwi Satya Wardini, SE selaku Kepala Subbagian Keuangan menjelaskan bahwa keterbukaan informasi terkait aspek pendanaan dalam penataan desa menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Sementara itu,

Daryanti, S.Sos selaku Kepala Bidang Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa menekankan pentingnya koordinasi lintas bidang agar informasi yang disampaikan kepada publik bersifat konsisten dan tidak menimbulkan persepsi yang berbeda.

Di sisi lain, Henny Sutikno, S.IT., M.Kes selaku Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat menyampaikan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan desa melalui komunikasi yang intensif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan. Menik Nur Utami, SH selaku Kepala Bidang Kerja Sama Desa dan Ekonomi Desa juga menambahkan bahwa komunikasi yang kolaboratif antar desa menjadi strategi penting untuk memperluas dukungan terhadap program penataan desa. Pernyataan para narasumber tersebut menunjukkan bahwa strategi komunikasi pemerintah tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga kolaboratif dan berbasis penguatan kelembagaan.

Strategi komunikasi pemerintah dalam membangun partisipasi dan kepercayaan publik menekankan pada transparansi, dialog, kolaborasi, serta konsistensi pesan. Pemerintah berupaya menciptakan ruang komunikasi yang memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan penataan desa diharapkan tidak hanya dipahami secara administratif, tetapi juga diterima secara sosial. Kepercayaan publik yang terbangun melalui komunikasi yang efektif akan menjadi modal penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat desa.

3. Persepsi Publik terhadap Kebijakan Penataan Desa dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya

Persepsi publik terhadap kebijakan penataan desa merupakan aspek yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat lokal. Persepsi tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui

proses panjang yang dipengaruhi oleh pengalaman, informasi, serta interaksi masyarakat dengan pemerintah (Rahayuningsih, 2014). Dalam konteks penataan desa, masyarakat akan menilai apakah kebijakan tersebut membawa manfaat atau justru menimbulkan dampak yang merugikan. Penilaian tersebut sangat dipengaruhi oleh cara pemerintah mengomunikasikan tujuan dan mekanisme kebijakan. Oleh karena itu, memahami persepsi publik menjadi langkah penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan penataan desa.

Persepsi publik seringkali dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap substansi kebijakan. Jika informasi yang diterima tidak lengkap atau sulit dipahami, maka interpretasi yang muncul bisa berbeda dari maksud awal pemerintah. Kondisi ini dapat menimbulkan kesalahpahaman yang berdampak pada munculnya resistensi sosial. Sebaliknya, ketika masyarakat memperoleh penjelasan yang jelas dan komprehensif, maka persepsi

yang terbentuk cenderung lebih positif. Dengan demikian, kualitas informasi yang diterima masyarakat menjadi faktor krusial dalam pembentukan persepsi.

Faktor pengalaman masa lalu juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi publik. Apabila masyarakat pernah mengalami kebijakan yang dinilai kurang menguntungkan, maka tingkat kepercayaan terhadap kebijakan baru cenderung lebih rendah. Trauma kebijakan sebelumnya dapat membentuk sikap skeptis terhadap setiap program pemerintah. Sebaliknya, jika pengalaman sebelumnya menunjukkan hasil yang baik, maka masyarakat lebih mudah menerima perubahan kebijakan. Persepsi publik dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan rekam jejak pemerintah daerah.

Lingkungan sosial dan budaya desa turut memengaruhi bagaimana masyarakat memaknai kebijakan penataan desa. Nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan solidaritas sosial menjadi kerangka berpikir masyarakat

dalam menilai kebijakan. Jika kebijakan dianggap sejalan dengan nilai-nilai tersebut, maka penerimaan publik akan lebih tinggi. Namun, apabila kebijakan dipersepsikan mengabaikan kearifan lokal, maka potensi penolakan dapat muncul. Oleh sebab itu, faktor budaya menjadi elemen penting dalam analisis persepsi publik.

Selain budaya, faktor kepemimpinan lokal juga berperan dalam membentuk opini masyarakat. Kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat memiliki pengaruh besar dalam menyampaikan interpretasi terhadap kebijakan. Persepsi publik seringkali mengikuti pandangan tokoh yang dihormati di lingkungan tersebut (Hidayat, 2017). Jika para pemimpin lokal mendukung kebijakan penataan desa, maka masyarakat cenderung lebih percaya. Sebaliknya, perbedaan pandangan di antara elite lokal dapat memicu polarisasi persepsi di tingkat masyarakat.

Media informasi juga menjadi faktor yang memengaruhi persepsi publik. Penyebaran

informasi melalui media sosial dapat mempercepat pembentukan opini, baik yang bersifat positif maupun negatif. Informasi yang tidak terverifikasi berpotensi menimbulkan rumor yang memperkeruh situasi. Dalam konteks ini, literasi media masyarakat menjadi sangat penting agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang keliru. Pemerintah perlu mengantisipasi dinamika ini dengan menyediakan informasi resmi yang mudah diakses.

Keterbukaan informasi dari pemerintah menjadi salah satu indikator utama dalam membentuk persepsi yang positif. Masyarakat cenderung memberikan penilaian yang baik ketika merasa dilibatkan dan diberi akses terhadap informasi yang relevan. Transparansi mengenai tujuan, proses, dan dampak kebijakan akan meningkatkan rasa percaya masyarakat. Sebaliknya, kurangnya keterbukaan dapat menimbulkan kecurigaan terhadap motif kebijakan. Oleh karena itu, transparansi menjadi

fondasi dalam membangun persepsi publik yang konstruktif.

Partisipasi masyarakat dalam proses penataan desa juga berpengaruh terhadap persepsi yang terbentuk (Ansor, 2011). Ketika masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi dan masukan, mereka merasa dihargai sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Rasa memiliki terhadap kebijakan akan meningkat jika partisipasi dilakukan secara nyata, bukan sekadar formalitas. Partisipasi yang bermakna akan memperkuat legitimasi kebijakan di mata publik. Dengan demikian, persepsi positif tidak hanya dibentuk oleh informasi, tetapi juga oleh pengalaman keterlibatan langsung.

Aspek ekonomi turut menjadi pertimbangan utama dalam persepsi masyarakat terhadap penataan desa. Perubahan wilayah atau struktur pemerintahan desa seringkali dikaitkan dengan akses terhadap anggaran dan pelayanan publik. Jika masyarakat meyakini bahwa kebijakan tersebut akan meningkatkan kesejahteraan,

maka dukungan cenderung lebih besar. Namun, jika muncul kekhawatiran akan berkurangnya fasilitas atau sumber daya, maka persepsi negatif dapat berkembang. Oleh karena itu, dampak ekonomi menjadi faktor sensitif dalam pembentukan opini publik.

Faktor psikologis juga tidak dapat diabaikan dalam memahami persepsi publik (Ansor, 2011; Ayudia & Wulandari, 2021). Perubahan administratif seringkali memunculkan rasa ketidakpastian di tengah masyarakat. Ketidakpastian ini dapat memicu kecemasan terhadap masa depan desa. Jika tidak diimbangi dengan komunikasi yang menenangkan dan informatif, kecemasan tersebut dapat berkembang menjadi penolakan. Pemerintah perlu memahami dimensi emosional ini dalam menyampaikan kebijakan penataan desa.

Persepsi publik juga dipengaruhi oleh konsistensi informasi yang diterima dari berbagai sumber. Ketidaksesuaian antara

pernyataan pejabat dan praktik di lapangan dapat menimbulkan kebingungan. Inkonsistensi tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh sebab itu, koordinasi internal pemerintah menjadi penting agar pesan yang disampaikan tetap seragam. Konsistensi komunikasi akan memperkuat kredibilitas pemerintah di mata publik.

Hubungan interpersonal antara aparat pemerintah dan masyarakat desa turut membentuk persepsi terhadap kebijakan. Interaksi yang ramah dan responsif akan menciptakan kesan positif terhadap pemerintah. Sebaliknya, sikap yang kaku dan kurang komunikatif dapat memperburuk citra kebijakan. Persepsi terhadap individu seringkali melekat pada persepsi terhadap institusi. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik menjadi bagian dari pembentukan persepsi secara keseluruhan.

Proses sosialisasi kebijakan menjadi tahap krusial dalam membentuk opini publik. Sosialisasi yang dilakukan secara dialogis memungkinkan terjadinya

klarifikasi atas berbagai pertanyaan masyarakat. Melalui forum tersebut, pemerintah dapat meluruskan informasi yang keliru. Sosialisasi yang terbuka juga menunjukkan komitmen pemerintah terhadap prinsip partisipatif. Hal ini akan berdampak positif terhadap persepsi masyarakat terhadap kebijakan penataan desa.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada keselarasan antara persepsi pemerintah dan persepsi masyarakat. Jika terjadi perbedaan pemahaman yang signifikan, maka potensi konflik sosial akan meningkat. Oleh karena itu, pemerintah perlu secara berkala melakukan evaluasi terhadap opini publik. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui forum diskusi, survei, maupun dialog langsung dengan masyarakat. Dengan memahami persepsi publik, pemerintah dapat melakukan penyesuaian strategi komunikasi.

Dinamika sosial di tingkat desa juga dapat memengaruhi persepsi terhadap kebijakan. Perbedaan kepentingan antar

kelompok masyarakat dapat memunculkan interpretasi yang berbeda. Kelompok yang merasa diuntungkan cenderung memberikan dukungan, sementara kelompok yang merasa dirugikan mungkin menunjukkan penolakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persepsi publik tidak bersifat homogen. Oleh sebab itu, pendekatan komunikasi perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kelompok.

Peran pendidikan dalam membentuk persepsi juga cukup signifikan. Tingkat pendidikan masyarakat memengaruhi kemampuan dalam memahami regulasi dan kebijakan. Masyarakat dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung lebih kritis dalam menilai kebijakan. Sementara itu, masyarakat dengan akses informasi terbatas mungkin lebih mudah dipengaruhi oleh opini lingkungan sekitar. Faktor ini perlu dipertimbangkan dalam merancang strategi komunikasi yang efektif.

Dalam jangka panjang, persepsi publik terhadap

kebijakan penataan desa akan memengaruhi legitimasi pemerintah daerah. Legitimasi yang kuat akan memperlancar pelaksanaan program pembangunan lainnya (Herlina, 2015). Sebaliknya, persepsi negatif yang terus berkembang dapat melemahkan otoritas pemerintah. Oleh karena itu, pembentukan persepsi publik yang positif bukan sekadar tujuan komunikasi, tetapi juga investasi sosial bagi keberlanjutan pemerintahan.

Persepsi publik terhadap kebijakan penataan desa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari informasi, pengalaman, budaya, kepemimpinan, hingga kondisi sosial ekonomi. Faktor-faktor tersebut membentuk cara masyarakat menilai dan merespons kebijakan yang diterapkan. Memahami kompleksitas ini menjadi langkah penting dalam merumuskan strategi komunikasi yang lebih efektif. Dengan pendekatan yang tepat, persepsi publik dapat diarahkan menjadi dukungan konstruktif terhadap kebijakan

penataan desa di Kabupaten Banyumas.

D. Kesimpulan

Komunikasi memegang peranan sentral dalam keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat desa. Model komunikasi organisasi yang terstruktur, menggabungkan pola vertikal dan horizontal, serta didukung oleh mekanisme koordinasi lintas bidang, menjadi fondasi penting dalam menjaga konsistensi informasi. Komunikasi yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dialogis dan partisipatif, memungkinkan terjadinya sinkronisasi kebijakan secara internal sebelum disampaikan kepada publik. Dengan sistem komunikasi yang tertata, potensi distorsi pesan dapat diminimalkan sehingga kebijakan penataan desa dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan terarah.

Strategi komunikasi pemerintah dalam membangun partisipasi dan kepercayaan publik juga terbukti menjadi faktor kunci dalam menciptakan legitimasi sosial terhadap kebijakan. Transparansi informasi, pelibatan masyarakat dalam forum musyawarah, serta kolaborasi dengan tokoh masyarakat menjadi pendekatan yang

memperkuat dukungan publik. Komunikasi yang adaptif terhadap karakteristik sosial dan budaya desa mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tujuan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan penataan desa tidak dipersepsikan sebagai keputusan sepihak, melainkan sebagai bagian dari proses bersama yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Persepsi publik terhadap kebijakan penataan desa dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari pengalaman masa lalu, tingkat pemahaman informasi, hingga dinamika sosial dan ekonomi lokal. Persepsi yang positif akan memperkuat stabilitas sosial serta mendukung kelancaran implementasi kebijakan, sedangkan persepsi negatif berpotensi menimbulkan resistensi. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memperkuat kualitas komunikasi organisasi dan strategi komunikasi publik secara berkelanjutan. Dengan komunikasi yang efektif, transparan, dan partisipatif, penataan desa dapat berjalan secara lebih inklusif serta berkontribusi pada peningkatan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan berkelanjutan di Kabupaten Banyumas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, N. A., & Purnaningsih, N. (2018). Pengaruh Komunikasi Internal dalam Membangun Budaya Organisasi. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 16(1), 89–108. <https://doi.org/10.46937/16201825198>
- Ansor. (2011). Teori Agenda Setting dan Citra Pemerintah: Analisis Peberitaan Korupsi dan Penurunan Citra Pemerintahan SBY. *Jurnal Komunikasi*, 5(2), 145–156.
- Ayudia, A. P., & Wulandari, S. S. (2021). Strategi Komunikasi Humas Dalam Meningkatkan Citra Pemerintah Kota Probolinggo. *Journal of Office Administration : Education and Practice*, 1(2), 249–268. <https://doi.org/10.26740/joaep.v1n2.p249-268>
- Darmawan, D. (2019). Peranan Kompleksitas Tugas, Persepsi Dukungan Organisasi, dan Regulasi Diri terhadap Niat Berpindah Kerja. *EBIS-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1). <https://ebis-jurnal.unsuri.ac.id/index.php/ebis/article/view/85>
- Devi Deswimar, A. (2014). Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan. *Jurnal EL-RYASAH*, 5(1), 41. <https://doi.org/10.24014/jel.v5i1.657>
- Firmansyah, A. D., Nurhidayah, N., & Amin, M. S. (2025). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi Dan Komunikasi Organisasi Terhadap Komitmen Anggota Himaprodi Manajemen. *E-JRM*, 14(1). <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/27769>
- Fuad, A. (2015). Peran Komunikasi Interpersonal Dalam Menghadapi Konflik Organisasi. *Orasi*, VI(1), 1–25. <http://satun108.com/forums/index.php/topic,509.0.html>
- Herlina, S. (2015). *Strategi Komunikasi Humas Dalam Membentuk Citra Pemerintahan Di Kota Malang*. 4(3), 493. www.publikasi.unitri.ac.id
- Hidayat, R. (2017). Peningkatan Aktivitas Komunikasi Interpersonal Dalam Organisasi Melalui Perbaikan Efikasi Diri, Kepemimpinan Dan Kekohesifan Tim. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 161. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i2.p161-170>
- Ida, S. W. (2013). Komunikasi Interpersonal Dan Iklim Komunikasi Dalam Organisasi (Ida Suryani Wijaya) KOMUNIKASI INTERPERSONAL DAN IKLIM KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 14(1), 115–126.
- Leonardus Leonardus, Aulia Rahman , & Eva Dwi Kurniawan . (2024). Hubungan Pola Komunikasi Pimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Dalam Novel Resign Karya Almira Bastari. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, 4(1), 262–271. <https://doi.org/10.55606/cendekia.v4i1.2539>
- Mulyadi, A. (2017). Strategi Komunikasi Humas Pemerintah Kota Sukabumi Dalam Menjalin Relasi Dengan Media. *Jurnal Ilmiah UMMI*, XI(03), 45–50.
- Ningrum, M. E. 2013. (2013). Peranan Komunikasi Internal Di Lingkungan Kerja. *Indept*, 3(1), 25–30.
- Radiansyah, R. R., & Sabilla, S. S. (2022). Strategi Komunikasi Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Dalam Mengoptimalkan Informasi Publik Melalui Media Sosial. *Jurnal JISIPOL*, 6(3), 79–98.
- Rahayuningsih, I. (2014). Komunikasi lintas budaya dalam organisasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(Agustus), 91–100.
- Syauket, A., Indriasari, R., Prayitno, R. B., Mendrofa, D. E. K., & Cabui, C. E. (2024). *Komunikasi Politik Pemerintahan*. CV. Literasi Nusantara Abadi.